

## **INTERVENSI TURKI DAN MESIR TERHADAP PERANG SAUDARA DI LIBYA**

**Zayyina Arini**

**Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.**

Email : [zayyina.arini18@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:zayyina.arini18@mhs.uinjkt.ac.id)

### **Abstrak**

*Kekacauan yang terjadi di Libya yang masih terus terjadi ini telah berjalan sekitar hampir satu dasawarsa. Setelah hancurnya Rezim Khadafi yang tewas terbunuh pada tahun 2011 telah menyebabkan kekosongan pemerintahan di Libya. Kekosongan pemerintahan ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor domestiknya untuk dapat memegang kekuasaan tertinggi di Libya. Kehadiran aktor eskternal juga memperkeruh keadaan di Libya. Turki dan Mesir merupakan dua negara yang menjadi rivalitas pada konflik ini. Kedua negara baik Turki dan Mesir sama-sama memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai di sana, melihat Libya merupakan salah satu negara dengan sumber daya minyak yang kaya. Libya saat ini memiliki dua pemerintahan yang saling bertolak belakang yaitu Government of National Accord (GNA) dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj bermarkas di Tripoli dan Libyan National Army (LNA) dikomando oleh Marsekal Lapangan Khalifa Haftar berpusat di Tobruk.*

*Turki bersama PBB mendukung Libya agar di bawah naungan pimpinan Government of National Accord (GNA) sedangkan Mesir mendukung Libya berada dalam kendali Libyan National Army (LNA). Keterlibatan dua negara ini juga dibantu oleh sekutu-sekutu mereka, akan tetapi Turki dan Mesir yang paling bersitegang dalam konflik ini. Yang melatar belakangi perbedaan kepentingan Turki dan Mesir yang juga tidak kalah penting adalah permasalahan ideologis. Mesir sangat menentang kehadiran Ikhwanul Muslim baik dalam negeri, maupun luar negeri. Jurnal ini menggunakan data kualitatif, data yang didapatkan bersumber dari data sekunder dengan pengambilan data kepustakaan (library research) seperti buku, jurnal, artikel, serta media lainnya. Metode kualitatif ini juga menggunakan penjelasan eksplanasi yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang sedang terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk memahami landasan kepentingan antara Turki dan Mesir melakukan intervensi terhadap konflik di Libya.*

**Kata Kunci:** Konflik Libya, Intervensi Turki-Mesir, GNA (*Government of National Accord* (GNA), LNA (*Libyan National Army*).

## **PENDAHULUAN**

Libya saat ini tengah dihadapkan oleh perang saudara yang tak berkesudahan serta melibatkan ikut campur dari negara-negara lain, termasuk Mesir dan Turki. Tensi konflik ini semakin tinggi ketika pada tahun 2015 PBB memberikan dukungan terhadap *Government of National Accord (GNA)* yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj di Tripoli dan hal tersebut didukung oleh Turki, diikuti dengan dukungan lain yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Qatar.

Rivalnya, Mesir memberikan dukungan terhadap *Libyan National Army (LNA)* dibawah pimpinan Marsekal Lapangan Khalifa Haftar, seorang mantan tentara loyal Gaddafi. Dalam hal ini Mesir mendapat dukungan dari Prancis, Rusia, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab berada dalam kubu yang sama. Baik Turki maupun Mesir, merupakan dua negara terbesar di sekitar timur Laut Mediterania. Keduanya pun dapat dikatakan sama-sama memiliki kekuatan militer konvensional terkuat di Timur Tengah. Di Libya, Turki dan Mesir secara aktif terus mengintervensi dan telah melakukan *Proxy War* seraya berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Sebelumnya, negara Libya pernah menjadi negara dengan standar hidup yang paling luhur di Afrika. Di awal masa kepemimpinannya Muammar Khadafi merupakan sosok yang penuh sanjungan dari masyarakatnya. Saat itu, Khadafi mengalokasikan sumber pendapat negara dari hasil produksi minyak dengan membangun infrastruktur, investasi, maupun barang dan jasa. Namun, setelah Khadafi menerbitkan buku "*The Little Green Book*" pada 1975, arah kepemimpinannya berubah drastis menjadi Sosialisme radikal, Khadafi menginginkan kekayaan menjadi milik semua orang secara sama dan setara, serta bagaimana pengelolaan itu dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam kongres, komite, serta konferensi (Abdallah, 2014).

Tahun 1988, Khadafi memberlakukan untuk melakuka bisnis pribadi, sejak saat itu kegiatan perdagangan Libya hanya dilakukan oleh "Komite Revolusioner". Kebijakan dalam negeri Libya semakin sewenang-wenang dan represif, rezimnya semakin korup dan hanya memberi kepuasan terhadap kaki tangannya. Momen klimaks terjadi pada saat pembantaian 1996 di Penjara Abu Salim, sekitar 1.270 tahanan termasuk aktivis politik terkemuka di Libya harus mengalami tindakan yang kejam dan tidak dibiarkan tersisa satupun. Dengan julukan "*Mad Dog*", Khadafi yang telah memimpin Libya selama 42 tahun akhirnya harus tewas terbunuh tepatnya pada Oktober 2011.

Setelah kepergian Khadafi, menyebabkan Libya harus menghadapi krisis finansial serta berbagai kekacauan dan kekerasan terus terjadi. GNA telah menciptakan kestabilan jangka pendek di wilayah Libya selama kepemimpinannya selama 3 tahun pertama, meskipun begitu GNA belum mampu untuk benar-benar menghilangkan segala permasalahan yang memecah belah Libya setelah jatuhnya Muammar Khadafi. Di bawah arahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, keterlibatan Turki pada konflik ini dimotivasi dengan adanya ambisi ekonomi serta misi strategis Erdogan (Yayla, 2020).

Menurut analisis *Rystad Energy*, Turki berkepentingan untuk melakukan eksplorasi gas yang berada di sepanjang perbatasan laut Turki dan Libya, bagian timur Laut Mediterania. Mesir yang berada di bawah pimpinan Presiden Abdul Fattah Sisi, memiliki kepentingan terhadap Kota Sirte dan al Jufra. Sirte yang berjarak 1000 km dari perbatasan Mesir memiliki pelabuhan minyak di wilayah bulan sabit sumur minyak timur di Libya, di sana merupakan tempat candangan minyak terbesar.

Sedangkan Pangkalan al Jufra merupakan salah satu pangkalan udara terbesar di Libya dengan infrastuktur yang mendukung untuk mengakomodasi persenjataan baru. Dikutip dari pernyataan

Dr. Gabriel al Obaidi, akademisi Libya, menurutnya siapapun yang dapat menguasai Sirte dan al Jufra, maka menguasai bagian timur dari Libya. Dalam mendukung GNA, Turki telah memberikan bantuan ekonomi serta militer dan tawaran tersebut diterima secara terbuka oleh GNA. Mesir justru menganggap GNA sebagai teroris yang didukung oleh sesama teroris. Tuduhan itu ditujukan kepada GNA dan Turki yang berhaluan Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai teroris oleh Mesir (Winer, 2019).

## **METODE**

Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis atau lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati (Moeleong, 2004). Metode kualitatif ini cenderung menggunakan analisis serta perlunya pemahaman terhadap suatu makna dan proses yang ditonjolkan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, metode penelitian ini perlu melakukan pengamatan terhadap semua data atau objek dan subjek penelitian yang sedang berlangsung sekarang atau bahkan masa yang akan datang. Kemudian dari hasil pengamatan serta pemahaman yang didapat, hasil penelitian mencoba untuk memberikan informasi yang aktual serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu memecahkan masalah.

Secara garis besar, metode penelitian deskriptif ini merupakan sebuah penelitian yang ingin melahirkan atau mencoba menggambarkan suatu peristiwa secara faktual, sistematis, serta penyusunan yang dilakukan dengan akurat. Selain itu, penelitian data keahliatan ini didapatkan oleh sumber sekunder dengan pengambilan data kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal, artikel, serta media lainnya. Metode kualitatif ini juga menggunakan penelitian eksplanasi yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang sedang terjadi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengarahkan mendapatkan fakta-fakta mengenai kepentingan Turki dan Mesir yang melakukan intervensi terhadap Libya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana latar belakang konflik di Libya setelah penggulingan Muammar Khadafi yang mana telah memimpin Libya selama 42 tahun lamanya. Diharapkan jurnal ini mampu menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai oleh Turki dan Mesir atas upaya intervensi kedua negara ini terhadap Libya. Di mana Libya merupakan salah satu negara dengan SDA minyak mentahnya yang kaya. Serta menjelaskan bagaimana peran PBB dalam upaya untuk mencapai perdamaian di Libya, serta mengusir keterlibatan aktor lain di Libya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum kepemimpinan Muammar Khadafi, Libya terlebih dahulu diperintah oleh Raja Idris I. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong agar Libya memperoleh kemerdekaan, khususnya penyatuan wilayah federasi Cyrenaica bagian timur, serta Tripolitania bagian barat, dan Fezzan di selatan yang berada di bawah bendera Kerajaan Libya. Setelah terpilihnya Raja Idris, Libya dihadapi oleh banyaknya permasalahan serius. Infrastruktur yang sudah tidak layak akibat perang, tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya pengetahuan akan melek huruf, dan sangat minimnya lahan untuk dikelola sebagai kegiatan pertanian. Keterpurukan yang dialami pada saat pemerintahannya berlangsung membuat Raja Idris I bergantung terhadap bantuan yang diberikan oleh Barat.

Dijelaskan dalam buku *A History of Modern Libya* oleh Dirk Vandewalle (2006), demi mendapatkan dana sebagai biaya pembangunan, Raja Idris I menyetujui permintaan atas Amerika dan Inggris yang pada itu merupakan negara pemberi bantuan kepada Libya untuk membangun basis militer. Penemuan cadangan minyak pada tahun 1959 di Libya

ini menjadikannya bukan lagi salah satu negara termiskin di dunia. Tetapi, pengaruh Barat tidak dapat dengan mudahnya dihilangkan dari Libya. Amerika Serikat memiliki peran signifikan atas pengembangan industri minyak yang berjalan di Libya. Pertumbuhan ekonomi di Libya di sisi lain menjadi bumerang bagi rakyatnya, karena kekayaan negara hanya terkonsentrasi kepada Raja Idris I dan jajarannya. Seiring maraknya kekacauan yang terjadi di masa pemerintahan Raja Idris I, berdampak pada ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinannya. Kekecewaan rakyat Libya semakin diperburuk dengan kehadiran ideologi Nasserisme dan Sosialisme Arab.

Kekuasaan Raja Idris I semakin membuat rakyat Libya geram, puncak dari kemarahan rakyat berujung kudeta militer yang dimulai pada 32 Agustus - 1 September 1969 yang dilaksanakan oleh Kelompok Gerakan Perwira Bebas (*Free Officers Movement*). Hal ini menjadi awalan karir politik dari seorang Muammar Khadafi. Kudeta ini dilakukan oleh Khadafi beserta 70 perwira militer dalam negeri Libya yang memiliki tujuan untuk penghapusan sistem monarki yang dijanjikan oleh Raja Idris I. Latar belakang yang menjadi pemicu kekecewaan Khadafi beserta rekan militernya yaitu kekalahan Mesir terhadap perang enam hari atas Israel. Raja Idris I saat itu lebih memihak kepada Israel sehingga menyebabkan adanya kekalutan di Tripoli dan Benzhagi.

Muammar Khadafi dengan nama lengkap Muamar Abu Minyar al-Khadafi lahir pada 7 Juni 1942 di Qasr Abu Hadi, Sirte. Ia berasal dari suku kecil arab yaitu Qhadadfa. Khadafi sempat menempuh pendidikan di Universitas Libya, tetapi tidak lama kemudian dirinya lebih memilih untuk menjadi pasukan militer Libya di Benzhagi pada 1961. Menurut Khadafi, perlu adanya tindakan revolusioner atas apa yang terjadi di Libya saat itu. Demi menata kembali kehidupan negara Libya yang sebelumnya telah dihadapkan oleh

banyaknya kerusuhan, dan merubahnya menjadi negara yang adil dan penuh kesejahteraan bagi rakyatnya.

Di awal pemerintahannya, Khadafi menghapus konstitusi di Libya 1951 yang dianggapnya merupakan produk kolonial. Kemudian dirinya menulis buku *The Little Green Book*, merupakan buku pendek dan menjelaskan bagaimana filsafat politik dari pemikiran Khadafi. Buku itu berupaya menjadikan dunia melakukan revolusi ekonomi, politik, dan sosial agar masyarakat terbebas dari segala penindasan. Dalam tulisan *Seeking Gaddafi : Libya, the West and the Arab Spring* oleh Daniel Kawcznski (2011), pada saat pemerintahannya Khadafi menerapkan hukum islam ke dalam aturan di Libya. Peran swasta dibatasi pada sektor minyak, perbankan, serta asuransi. Sistem pemerintahan Khadafi dinilai memang saat anti terhadap asing. Dirinya tidak segan untuk mengusir negara asing yang berada dalam Libya.

Khadafi sangat menggecarkan pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan hak pemenuhan dasar. Pada 2010, UNDP menyebut bahwa Libya merupakan salah satu negara dengan kualitas pembangunan manusia dalam kategori “tinggi” di Afrika. Tingkat melek huruf mencapai 88%, angka harapan hidup 74,5 tahun, ada kesetaraan gender, dan lain sebagainya.

Kebijakan tersebut mampu menjadikan Libya menjadi negara dengan Indeks Pembangunan Tertinggi (IPM) di Afrika pada tahun 2011. Namun, kepemimpinan Khadafi lama-lama mengalami pergeseran. Perlahan, Khadafi menghapus segala campur tangan oleh pihak swasta di Libya. Dirinya juga melarang kepemilikan tempat tinggal lebih satu, perusahaan yang awalnya miliki perorangan kini diambil alih oleh negara, serta ada pembatasan akses individu terhadap rekening bank.

Dijelaskan dalam jurnal *Origins of The Libyan Conflict and Options for Its Resolution* oleh Jonathan M. Winer (2019), sosialisme radikal Khadafi dijabarkan secara rinci dalam manifestonya tahun 1975, *The Little Green Book* yang menyatakan bahwa kekayaan menjadi milik semua orang secara setara, dan mereka dapat memutuskan bagaimana mengelolanya dengan berpartisipasi dalam komite, kongres, dan konferensi populer. Orang-orang memiliki kebiasaan dalam memutuskan kompromi karena kesamaan keluarga dan suku pada umumnya dapat menemukan solusi yang masuk akal di dalam komunitas. Tapi Khadafi telah mencegah hal ini terjadi di tingkat nasional. Semakin lama, kebijakan dalam negeri di Libya semakin dipandang sewenang-wenang, sekaligus represif.

Sementara Khadafi berbagi kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar sebagian besar warga Libya, tetapi rezimnya semakin terlihat sebagai kleptokrasi korup yang diuntungkan, Khadafi, keluarganya, dan antek-anteknya dulu. Pemberontakan awal di Benghazi mengungkap retakan yang telah lama berkembang dalam kontrak sosial antara Khadafi dan rakyat Libya. Orang miskin termasuk orang-orang di wilayah Cyrenaica di timur Benghazi, yang menghasilkan sebagian besar kekayaan minyak Libya, orang-orang pedalaman Sahara, serta kaum Islamis yang membenci pemerintahan Khadafi yang murni sekuler.

Rezim Khadafi tidak memberikan hak politik yang berarti dan di mana kekayaan di luar dasar-dasar dibagi antara "yang kaya" (mereka yang disukai oleh Khadafi) dan "yang miskin" (orang lain). Revolusi dilakukan masyarakat Libya pada 17 Februari 2011 sebagai oposisi, pasukan Khadafi hanya menguasai sedikit wilayah Libya yaitu, Tripoli, Sirte, dan Sabha.

Pemberontakan di Benghazi menjadi perhatian dunia internasional, dan dijadikan sebagai alasan bagi PBB beserta NATO untuk mengintervensi Libya

mengatasnamakan kepentingan perlindungan terhadap warga sipil. PBB melahirkan resolusi PBB 1973 serta melancarkan serangan udara di Libya. Pengeboman yang terjadi sepanjang Maret hingga Oktober 2011 berkontribusi melemahkan Khadafi di satu sisi dan memperbesar kekuatan pemberontak di sisi lain. Dengan kematian Khadafi pada 20 Oktober 2011, justru penyelamatan yang dilakukan oleh non-Libya aktor menimbulkan masalah baru di Libya, yaitu kekosongan yang mengikuti pembunuhan Khadafi terus memicu konflik kekerasan, masalahnya baru saja dimulai.

Konflik di Libya dipenuhi oleh serangkaian kontroversial serta kompleksitas di dalamnya. Faktor-faktor pendorong terjadinya konflik ini berasal aktor politik lokal serta faktor eksogen. Banyak aktor yang memiliki kepentingan atas apa yang dialami Libya saat ini. Adanya dua kepentingan paling mencolok antara Euro-Mediterrania maupun antar-Arab. Pemerintahan Khadafi, tentunya bukan contoh pemerintahan yang baik dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demonstrasi secara besar-besaran dilakukan untuk menggulingkan rezim Khadafi. Kondisi yang semakin kacau ini dengan cepat tersapu oleh konflik yang terutama diperangi oleh aktor non-Libya, serta menyebabkan hancurnya lembaga dalam negeri, serta maraknya pembentukan milisi lokal. Kegagalan ambisi lokal dalam menjalankan negara yang stabil tanpa adanya pemimpin dan eksogen telah menyebabkan krisis di mana faktor-faktor tambahan dapat mempengaruhi perang saudara Libya, membuat situasi menjadi sangat kabur dan sangat sulit untuk diselesaikan.

Dalam pandangan saya, keadaan yang tidak menentu saat ini tidak terlepas dari adanya intervensi NATO dalam menjatuhkan Rezim Khadafi. Saat itu PBB menyetujui serangan NATO terhadap Khadafi yang dianggap melakukan pelanggaran kemanusiaan di Benghazi.

Sekarang, Libya telah terpecah belah, kepergian Khadafi tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Aktor-aktor eksternal itu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan pada Libya. Akibat intervensi NATO, Libya mengalami kegagalan pemerintah pusat yang kredibel dalam mengontrol milisi yang kuat, menyebabkan serangkaian insiden yang semakin serius.

Kekerasan yang semakin meningkat ini memperjelas adanya representasi yang keliru. Intervensi militer menimbulkan konsekuensi yang menakutkan. Begitu Khadafi jatuh, Libya seharusnya merdeka dan rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan, tetapi Libya saat ini tampaknya masuk ke dalam jebakan. Siklus kekerasan yang terus meningkat, ini mencapai titik nadirnya ketika Jenderal Haftar bersamaan dengan CIA melancarkan strategi untuk melakukan kudeta.

Intervensi Libya memicu krisis keamanan manusia; itu juga mengirimkan gelombang kekerasan, ketidakstabilan dan kekacauan ke seluruh Afrika utara. Efeknya tidak mungkin berhenti di situ. Jika Barat ingin menangani krisis keamanan yang ditimbulkannya, ia harus mengatasi baik lembaga lemah yang bertugas menjaga keamanan tetapi juga akar penyebab dari keluhan yang mengarah pada perekrutan populer ke kelompok-kelompok Islamis ini.

Dalam jurnal *Egypt's Security Paradox in Libya* oleh Kay Westenberger (2019) menjelaskan mengenai apa yang mendasari campur tangan Mesir ke dalam perang saudara di Libya tersebut. Kompleksitas yang terjadi pada konflik di Libya dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat di dalamnya membuat konflik ini menjadi sulit untuk diselesaikan dengan sekejap mata. Permasalahan internal yang dihadapi oleh Libya yaitu tidak adanya pemerintahan pusat yang stabil pasca runtuhnya rezim Khadafi. Kemudian, adanya intervensi dari aktor negara serta aktor non-negara yang saling terkait dan mempengaruhi. Mesir dan Turki merupakan

kedua negara yang terlibat dalam konflik ini. Situasi di Libya sejak 2011 hingga saat ini sangat kompleks.

Runtuhnya pemerintahan pusat, lembaga negara, dan ketertiban mendorong munculnya aktor-aktor lokal yang saat ini saling memperebutkan kekuasaan. Libya saat ini dihadapkan oleh keadaan ekstrim terhadap pembagian kekuasaan yang terdesentralisasi dan konflik horizontal antar suku-suku, kelompok etnis, milisi, lingkungan, desa, serta kota (Droz-Vincent, 2018). Libya menjadi negara yang sangat diperebutkan sebagai tempat penawaran insentif yang berbeda-beda ke berbagai kelompok bersenjata yang ada di wilayah tersebut (Carboni & Moody, 2018). Tahun 2016 merupakan awal hadirnya dua kubu pemerintahan pusat di Libya. PBB secara resmi mendukung pemerintahan yang dipegang oleh *Government of National Accord* (GNA) dipimpin oleh Perdana Menteri Fayeze Al-Sarraj yang berbasis di Tripoli. Di satu sisi, *Libyan National Army* (LNA) yang dipelopori oleh Khalifah Haftar, sebelum itu dirinya pernah menjadi bawah tangan Khadafi dalam memimpin Libya juga mengklaim bahwa LNA merupakan pemerintahan yang sah. Selain PBB, dukungan kepada GNA juga diberikan oleh milisi revolusioner kota-kota barat, Ikhwanul Muslimin, serta dukungan internasional seperti Turki salah satunya di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan. Sedangkan Mesir, di bawah pimpinan Abdel Fattah Al-Sisi sebagai salah satu negara yang berdekatan dengan Libya mendukung pemerintahan di bawah kendali LNA.

Konflik yang terjadi di Libya ini juga mendorong aktor non-negara seperti PBB dan Uni Eropa untuk membantu penyelesaian konflik antar dua faksi yang ada. Uni Eropa meminta kepada negara-negara Libya untuk membantu terciptanya demokrasi dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang justru mengarah kepada perpecahan (Shaista, 2017). Aktor non-negara ini membantu untuk

pemerintahan di Libya menjaga hukum dan ketertiban. Hambatan terciptanya perdamaian di Libya dikarenakan perbedaan kepentingan lokal serta pengaruh dukungan eksternal tidak hanya mampu memperkeruh konflik, tetapi mengancam keamanan kota (Kamouni-Janssen, 2017). Pengaruh milisi juga patut dipertimbangkan sebagai penyelesaian konflik dan di bawa ke dalam meja negosiasi. Kelompok bersenjata serta koalisi memegang otoritas *de facto* pada tingkat lokal dan memepentingkan kepentingan lokal itu sendiri dibandingkan dengan mematuhi perjanjian internasional.

Kay Westenberger (2019) dalam jurnal menjelaskan kepentingan Mesir atas intervensinya di Libya. Ketidakstabilan di Libya, secara langsung mengancam keamanan negara tetangganya, salah satunya Mesir. Tantangan terbesar bagi Mesir yaitu perbatasan Mesir-Libya sejauh 1.150 KM. Sejak jatuhnya rezim Khadafi, kekerasan yang terjadi di perbatasan terus terjadi. Meskipun banyaknya pasukan Mesir berada di gurun barat, serta ranjau darat di sepanjang perbatasan, tetap saja perbatasan menjadi pusat tempat penyelundupan senjata, obat-obatan dan manusia, termasuk ekstremis dan militan musuh. Konflik di Libya juga berdampak negatif kepada sektor perdagangan bilateral Mesir-Libya. Kegiatan ekspor Mesir ke Libya harus mengalami kemerosotan hingga 75% (Giuseppe, 2017).

Kementrian Luar Negeri Mesir daalam Mediterranean Affairs 2016, mengklaim akan melipatgandakan investasi di pasar Mesir dengan meningkatkan kerjasama ekonomi guna memulihkan volume perdagangan sebelum revolusi serta mendukung rekonstruksi di Libya setelah negara itu stabil. Sehubungan dengan kegiatan perekonomian, kepentingan intervensi Mesir adalah harapan atas kepentingan enrgi milik Libya. Mesir merupakan salah satu negara pengimpor energi dan mengakumulasiannya dari tiga miliar dolar AS dan berhutang dengan

perusahaan enegeri asing lainnya. Kekayaan minyak dan gas yang dimiliki oleh Libya diharapkan menjadikan Mesir sebagai negara pengimpor dengan harga yang lebih murah.

Selain kepentingan ekonomi, kepentingan ideologis juga menjadi salah satu kepentingan Mesir. Hal ini masuk akal, karena Mesir sendiri memiliki hubungan yang tidak baik dengan Ikhwanul Muslim. Tujuan utama Mesir adalah melawan pengaruh Ikhwanul Muslimin di dalam dan luar negeri. Rivalitas antara Turki dan Mesir di Libya salah satunya disebabkan oleh hal ini, Turki memberikan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin di Libya. Mengenai kepentingan Mesir yang paling mendesak, Libya yang dianggap stabil jika pemerintah pusatg mampu mengamankan perbatasannya, mengatasi ancaman Islamis internal dan jihadis, serta terlibat dalam perdagangan bilateral dengan Mesir tampaknya merupakan solusi jangka panjang yang lebih disukai. Meskipun Mesir secara resmi mendukung perdamaian PBB, tetapi di sisi lain Mesir mendukung suku-suku dan milisi Timur di Libya dan pemerintah Haftar yang menolak proses negosiasi yang didukung PBB. Ini merupakan kebijakan Mesir yang berkontradiksi satu sama lain terhadap praktiknya.

Dalam memahami kontestasi ideologi Turki dan Mesir ini dalam pandangan saya ini terjadi karena adanya kekhawatiran di masing-masing pihak. Perseteruan antar keduanya ini terkait dengan bangkitnya kelompok Ikhwanul Muslimin, di satu sisi adalah kerugian bagi Mesir dan sisi yang lain keuntungan bagi Turki.

Seperti yang kita tahu, bahwa Mesir yang sebelumnya dipimpin oleh Muhammad Mursi yang merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin pasca Arab Spring yang kemudian dikudeta oleh Abdul Fattah al-Sisi pada tahun 2013. Libya dianggap mempengaruhi posisi strategis terhadap keamanan nasional Mesir. Pasca Libya

memiliki dua pemerintahan, di wilayah Tripoli kedudukannya dipegang oleh Ikhwanul Muslimin, yang mana telah dinyatakan oleh Kairo bahwa kelompok tersebut adalah bagi dari organisasi teroris. Karena, Mesir benar-benar tidak ingin kebangkitan Ikhwanul Muslimin berada dalam wilayah domestik maupun regionalnya.

Berbeda dengan Turki, mereka pro terhadap Ikhwanul Muslimin. Libya, dahulu kala merupakan bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyyah, pendahulu Republik Turki modern. Dukungan Erdogan ini menjadi ciri kebijakan Pan-Islamismenya. Termasuk dukungan militer untuk pemerintahan di Tripoli. Hal ini, mengacu kepada dominasi maritim Turki selama era Ottoman di Mediterania Timur dan Laut Aegea.

Mesir mendukung kepemimpinan Haftar yang memimpin koalisi milisi federalis, suku Timur, serta unit militer di wilayah Libya Timur. Bagi Mesir, Haftar merupakan orang yang menggabungkan berbagai kepentingan, salah satunya menekankan pentingnya stabilitas di Mesir. Selain itu, Haftar paling vokal dalam menentang Ikhwanul Muslimin. Haftar aktif terlibat dalam perang melawan jihadis dan Islamis, mengambil sikap yang jelas melawan Ikhwanul Muslimin di Libya. Persamaan kepentingan antara Haftar dengan presiden Mesir yaitu Al-Sisi yaitu sama-sama memiliki keyakinan bahwa aturan militer yang kuat sebagai terciptanya stabilitas serta identitas nasional. Haftar dan LNA, secara tegas menentang GNA yang didukung PBB. Mesir secara aktif turut serta dalam upaya perdamaian terlibat dalam diplomasi internasional untuk melakukan rekonsiliasi politik.

Mesir mendukung mediasi yang dipimpin oleh PBB serta bersedia menjadi tuan rumah untuk membangun konsensus antara partai yang di Libya kemudian mendorong penyatuan militer serta lembaga lainnya. Mesir juga menuduh bahwa komunitas internasional justru menjadi alasan lambatnya upaya transisi yang

dilakukan di Libya. Sedangkan Al-Sisi menuduh atas pengusiran yang dilakukan oleh komunitas internasional kepada Khadafi. Mesir meminta kepada aktor internasional lainnya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi di Libya, dengan pembangunan institusi yang stabil, rekonstruksi, serta pemerintah pusat di Libya. Mesir sendiri telah menyiapkan rencana cadangan jika nantinya Haftar gagal menguasai Tripoli (Lewis & Awadalla, 2020).

Bagi Turki sendiri, Libya merupakan negara yang menjadi salah satu acuannya dalam melakukan kerja sama ekonomi. Sebelum terjadinya revolusi pada Februari 2011, kepentingan Turki di Libya fokus terhadap penguatan kepentingan ekonominya dan investor dari Turki memompa miliaran dolar ke sektor ini, perusahaan bisnis Turki menandatangani sekitar 304 kontrak komersial di Libya (Polat, 2019). Dalam menopang kepentingan ekonomi di Libya, Turki menentang adanya intervensi militer NATO untuk menjatuhkan rezim Khadafi. Setelah Khadafi tewas, Turki mengubah arah posisinya dengan mendukung revolusi Libya dan mendukung *Government of National Accord* (GNA).

Dalam jurnal Arab Center for Research & Policy Studies yang berjudul *Turkey's Growing Role in Libya : Motivates, Background, and Response* (2020) menjabarkan mengenai intervensi Turki di Libya dalam tiga tahapan :

1. Pada 2014, Turki berupaya memulihkan hubungan ekonomi dengan Libya dengan mendukung adanya stabilitas dan pemerintah pusat yang stabil. Jatuhnya Rezim Khadafi dan segala kekacauan Libya akibat perang saudara sangat merugikan kepentingan Turki. Transformasi di Libya justru menjadi akar konflik regional. Turki sering menjadi tuan rumah bagi beberapa lembaga media dan tokoh politik yang menentang proyek Haftar di wilayahnya.

2. Turki mendukung perjanjian politik Libya yang ditandatangani di Skhirat yang dinaungi oleh PBB, pada bulan Desember 2015. Peran militer Turki mendukung pemerintah yang diakui secara internasional di Tripoli, terutama setelah serangan Haftar pada ibukota pada bulan April 2019. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berunding kepada Perdana Menteri *Government of National Accord* (GNA) yaitu Fayez al-Sarraj, menyatakan bahwa Ankara telah siap memberikan segala macam bantuan serta segala upaya perlawanan yang disebutnya "persekongkolan melawan rakyat Libya".

3. Pada 27 November 2019, Pemerintah Turki di bawah pimpinan Erdogan bersama dengan *Government of National Accord* (GNA), menandatangani nota kesepahaman tentang kedaulatan atas wilayah laut di Laut Mediterania.

Dalam pandangan saya mengenai tiga tahapan keterlibatan Turki di Libya yaitu adanya kepentingan ekonomi yang diperjuangkan oleh Turki. Melihat perjanjian atas wilayah Laut Mediterania sangat jelas, Turki sangat ingin mengambil keuntungan sumber daya Laut Mediterania. Mengingat wilayah tersebut sangat kaya akan minyak dan juga gas. Turki harus mempertahankan eksistensinya di Libya, jika Libya berhubungan dengan salah satu rival yaitu Mesir, maka Turki tidak akan bisa berlutut di Laut Mediterania.

Keterlibatan Turki dan Mesir merupakan jaringan kompleks aktor terhadap kepentingan geoekonomi dan kepentingan geostrategis di Libya yang juga mempengaruhi pencarian politik dan penyelesaian konflik lebih luas. Aksi aktor asing di Libya menggaris bawahi adanya konteks geopolitik di mana konflik tersebut sedang berlangsung, dan efek kontraproduktifnya adalah upaya prospek perdamaian, memberanikan pihak yang bertikai untuk mengambil sikap tegas.

Konflik ini telah menyebabkan produksi minyak di Libya mengalami kerugian yang masif, sebesar miliaran dolar. Hingga pada Februari 2020, kerugian atas penutupan minyak telah melebihi \$ 1,4 miliar dan diperkirakan meningkat seiring dengan eskalasi kekerasan yang terus terjadi. Maka, kepentingan Turki di Libya lainnya yaitu kepentingan bisnis dan mengeksport barang senilai US \$2 miliar setiap tahunnya. Proyek tersebut harus terhenti karena konflik yang sedang berlangsung di Libya. Mengakibatkan kerugian Turki senilai US \$19 miliar. Saat ini, Turki terus mengawasi konstruksi untuk masa depan di Libya. Erdogan mencoba menggunakan perjanjian bilateral antara Libya dan Turki sebagai meningkatkan jejak dan kebijakan Turki di kawasan tersebut terhadap para pesaingnya, yaitu Mesir. Mendukung *Government of National Accord* (GNA) adalah satu dari banyaknya upaya Turki agar terus terlibat di masa yang akan datang bersama Libya. Turki mungkin memiliki beberapa strategi keuntungan dengan menyelaraskan kepentingannya kepada negara Afrika Utara yang kaya minyak. Tapi hal itu semacam pertarungan: jika Haftar menang, Turki kalah.

## KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan aktor-aktor eksternal di Libya justru memperburuk situasi dan kondisi wilayah di Libya. Hal ini terus terjadi setelah rezim Khadafi runtuh dan menciptakan dua pemerintahan domestik yang saling memperebutkan kekuasaan. Kemudian, upaya terciptanya perdamaian justru dijadikan ajang memperebutkan kepentingan masing-masing aktor eksternal. Kepentingan ekonomi atas sumber daya di Laut Mediterania menjadi hal yang saling diperebutkan, kemudian adanya perbedaan ideologis Turki dan Mesir juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam upaya menciptakan perdamaian, perlu adanya aktor netral yang menjadi mediator perdamaian dan membentuk pemerintahan Libya yang stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Kemal, 2014. *The Libyan Coup That Never*. Al Ahram Weekly. [weekly.ahram.org.eg/News/5470.aspx](http://weekly.ahram.org.eg/News/5470.aspx)
- Aidan Lewis & Nadine Awadalla. (June, 2020), "Egypt Offers New Libya Plan as Haftar Offensive Collapses," dalam Reuters, . [Online] Tersedia <https://www.reuters.com/article/us-libya-security/egypt-offers-new-libya-plan-as-haftar-offensive-collapses-idUSKBN23D0KK>. [19 Oktober 2020].
- Background Notes: Libya," 1994. *US Department of State*, 5, no 8, 3.
- Carboni, Andrea and James Moody, 2018. *Between the Cracks: Actor Fragmentation and Local Conflict Systems in the Libyan Civil War*. *Small Wars & Insurgencies*, 29, no. 3 : 462.
- Dentice, Giuseppe, 2017. *Egypt's Security and Haftar: Al-Sisi's Strategy in Libya*. Italian Institute for International Political Studies, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/egypts-security-and-haftar-al-sisis-strategylibya-16284>.
- Droz-Vincent, Philippe, 2018. *Competitive Statehood in Libya: Governing Differently a Specific Setting or Deconstructing its Weak Sovereign State with a Fateful Drift Toward Chaos?*. *Small Wars & Insurgencies* 29, no. 3.
- El Kamouni-Janssen, 2018. *Local security governance in Libya Perceptions of security and protection in a fragmented country*. Clingendael Netherlands Institute of International Relations; CRU-Report.
- Kawczynski, Daniel, 2011. *Seeking Gaddafi : Libya, the West and the Arab Spring*. Biteback Publishing, 2011.
- Libya: June 1996 Killings at Abu Salim Prison, 2006. <https://www.hrw.org/news/2006/06/27/libya-june-1996-killings-abu-salim-prison> [25 September 2020].
- Mediterranean Affairs, 2016.. *The Egyptian Security Complex and Libya's slow pace transition:Libya's internal chaos"*. [Online] Tersedia:<http://mediterraneanaffairs.com/egyptian-security-libya-slow-transition/> [
- Mezran, Karim dan Aruro Varvelli, 2017. "Foreign Actors in Libya's Crisis". :[https://www.ispionline.it/it/EBook/LIBIA\\_2017/LIBIA\\_WEB.DEF.pdf](https://www.ispionline.it/it/EBook/LIBIA_2017/LIBIA_WEB.DEF.pdf)
- Moeleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Polat, Ferhat, 2019. *The Trajectory of Turkey-Libya Relations*, [Online] Tersedia <https://bit.ly/2Q5tA8q>. [29 September 2020].
- Salma, Mutia Zakia, 2012. *Geopolitik dunia Arab: Libya, Mesir, Tunisia, Bahrain, dan fenomena Arab Spring*. [Online]: <http://mutiazakia-fisip10.web.unair.ac.id/>

- Shaista, Shaheen Zafar, 2017. *The European Union's Role in Post-Gaddafi Libya*. Journal of European Studies 33, no.1 : 33–53.
- Vandewalle, Dirk, 2012. *A History of Modern Libya*. Cambridge University Press, 2<sup>nd</sup> Edition.
- Westenberger, Kay, 2019.. *Egypt's Security Paradox in Libya*. [Online] Tersedia <https://www.eir.info/2019/04/08/egypts-security-paradox-in-libya/>
- Winer, Jonathan M., 2019. *Origins of The Libyan Conflict and Options for Its Resolution*. [Online] Tersedia: <https://www.mei.edu/publications/origins-libyan-conflict-and-options-its-resolution> [25 September 2020]
- Yayla, Ahmet, 2020. Erdogan's Libyan Adventure: Turkey, Russia, Gas Pipelines and Missiles.